

RPSEP-30

MEREFLEKSI PENTINGNYA DIMENSI WILAYAH SEBAGAI FAKTOR LOKASIONAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA PALEMBANG

Oleh : ennys@ut.ac.id
Dosen Fekon UPBJJ-UT Palembang

Abstrak

Pada saat ini Palembang berkeinginan merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman dan Sejahtera) dengan ikon Jembatan Ampera, dan mewujudkan Palembang kota International atau Sumsel go International. Pemerintah kota telah membuat rencana jangka menengah hingga tahun 2031, yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan membagi daerah menjadi Sembilan kawasan strategis, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terus berkembang..

Dimensi wilayah merupakan hal penting dalam menganalisis dan menentukan dimana suatu program atau proyek diletakkan dalam perencanaan pembangunan. Wilayah dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan ekonomi. Dengan demikian pemilihan atau penentuan lokasi akan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan tersebut. Dalam studi pembangunan pengertian wilayah ditekankan bagaimana pentingnya kedudukan pusat urban tingkat nasional berkaitan dengan aglomerasi industri..

Dalam tulisan ini akan dibahas strategi penting dan menarik yang berpengaruh mendasar terhadap penataan ruang wilayah baik secara regional maupun nasional. Gejala ekonomi menjadi jelas dan nyata apabila tata ruang wilayah diterapkan dalam kerangka analisis pembangunan ekonomi. Selanjutnya apakah dimensi wilayah perencanaan strategis tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis dan sosial oleh pemerintah kota Palembang dengan efektif dan efisien. Tantangan dalam menghadapi permasalahan perencanaan dan pelaksanaan harus didukung oleh kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang, walaupun kadang kala kebijakan harus bertentangan dengan budaya, adat istiadat, karakter manusia setempat.

Peluang kota Palembang harus digali dengan sebaik-baiknya mulai dari sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam. Pemanfaatan harus dicermati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya, sehingga pembangunan terus berkembang. Keberhasilan pembangunan merupakan modal dasar untuk mewujudkan Palembang EMAS.

Kata Kunci : dimensi wilayah, faktor lokasional, pembangunan ekonomi

Abstract

At this time Palembang eager to realize the vision and mission that has been set at Palembang EMAS (Elegant, Civil, Safe and Prosperous) with Ampera Bridge icons, and realize the city of Palembang in South Sumatra International or go International. The city government has made a medium-term plan until the year 2031, as stipulated in the Spatial

Plan (Spatial) by dividing the area into nine strategic areas, so that the development and economic growth continues to grow ..

Dimensional region is important in analyzing and determining which a program or project is put into development planning. Connoted region with the location of a development activity or economic activity. Thus the selection or determination of the location will affect the sustainability of these activities. In the area of development studies emphasized how important understanding the position of the center of national urban agglomeration berkaitan the industry ..

In this paper will discuss important and interesting strategy that fundamentally affect the spatial structuring both regionally and nationally. Symptoms became apparent and the real economy if applied spatial analysis within the framework of economic development. Furthermore, if the dimensions of the area of strategic planning has been implemented economically and socially by the city of Palembang with effectively and efficiently. Challenge in addressing the planning and implementation of strategic policies must be supported by short-term, medium and long term, although sometimes at odds with the policy should be the culture, customs, local human character.

Opportunities should be explored Palembang city with the best start of human resources, and natural resources. Utilization should be observed ranging from planning, implementation, and evaluation to determine the next policy, so that development continues to grow. The success of development is the basis for realizing Palembang EMAS.

Keywords: *dimensional region, locational factors, economic development*

A. Pendahuluan

Sejak terpilih sebagai walikota Palembang H.Romi Hertton yang pada saat ini menjadi tahanan KPK terus berupaya merealisasikan program kerja, terutama dalam merumuskan visi, misi dalam mencapai Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, dan Sejahtera), dengan ikon Jembatan Ampera untuk mewujudkan Palembang kota Internasional. Oleh sebab itu marilah kita analisa kajian tersebut melalui Ekonomi Regional terutama pengembangan kawasan yang diterapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah kota Palembang.

Pertumbuhan wilayah dari dalam dimaksudkan sebagai telaah atau wacana untuk mengamati proses berlangsungnya pertumbuhan pembangunan dalam suatu wilayah yang ditinjau dari segi hubungan fungsional atau interaksi antar sub sistem dalam suatu wilayah. Tata ruang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tata ruang wilayah secara geografis, Tata ruang wilayah dengan *polarisasi* membahas pengertian tentang ketergantungan antar berbagai elemen yang ada, sebagai landasan untuk mengkaji pusat-pusat kota yang saling ketergantungan.

Ekspansi perangkat kegiatan-kegiatan *polarisasi* terkait akan menimbulkan dua macam dampak yaitu *aglomerasi* (*agglomeration effect*) yang terjadi jika industri pendorong berhasil menarik kegiatan-kegiatan komplementer (saling melengkapi). Kegiatan untuk memperoleh kesempatan kumulatif dengan tingkat biaya yang lebih rendah terkonsentrasi pada sebuah tempat, disebut dampak pertemuan jalan (*junction effect*). Kedua kegiatan ini timbul akibat dari konsekuensi dari penciptaan jaringan transformasi yang melayani utamanya kepada unit-unit pendorong dan kegiatan-kegiatan ekonomi terkait lainnya secara langsung. Sedangkan kegiatan yang melayani produsen disepanjang jaringan transformasi untuk memperoleh akses pasar harus juga berjalan secara langsung.

Jika dilihat dari segi tata ruang wilayah geografis, industri-industri pendorong dan industri-industri yang dominan telah mendorong terjadinya *aglomerasi* pada kutub-kutub pembangunan di mana mereka berada, maka jelaslah bahwa besarnya kapasitas industri mempunyai pengaruh yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh dengan dioperasikan pelabuhan Tanjung Api-api berdampak pada penyerapan tenaga kerja, areal pergudangan, industri sangat jelas pertumbuhan ekonominya. Menurut rencana kawasan ini akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan melalui Tanjung Carat akan menjadi pelabuhan Internasional dengan luas 3000 hektar dan bisa disandari 7000 DWT (*dead weight tonnage*). Sebagai contoh lainnya adalah pembukaan daerah baru Jaka Baring, daerah Grand City, daerah Alang-alang Lebar, daerah Karya Jaya, daerah Sukarami, Kertapati dan sebagainya.

Palembang dengan luas wilayah 400,41 kilometer persegi, dengan penduduk 1,5 juta jiwa yang tersebar dalam 16 kecamatan, 107 kelurahan kota Palembang terus berbenah diri, sehingga kota ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 9,71%, pendapatan per kapita Rp.32.670.008, dan dengan pertumbuhan penduduk 1,76 persen Struktur perekonomian didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa, dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 77,38% (Pemerintah kota Palembang dalam Sumeks 16 Mei 2014 halaman 49). Pesatnya kemajuan Palembang tentunya tidak lepas dari sejarah sebelumnya yaitu kejayaan kerajaan Sriwijaya, pusat pendidikan Budha di Asia Tenggara dan sebagainya. Sisa peninggalan tersebut masih dapat dilihat dengan jelas di kelurahan Bukit Lama, Kedukan Ilir, Boom Baru, Talang Kerangga, Karang Anyar, Benteng Kuto Besak yang berada dalam kecamatan Ilir Barat 1, Gandus, dan Ilir Timur 2 Palembang.

Ditambah lagi akses penerbangan langsung ke kota terbesar kelima di Indonesia antara lain melalui Singapura (50 menit), Kualalumpur (75 menit), Jakarta (50 menit) dan penerbangan ke kota lain di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini setidaknya ada Sembilan Kawasan Strategis yang telah dipersiapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain Agropolitan Gandus adalah kawasan untuk fokus pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian, kawasan industri ada di daerah Karya Jaya yang sekaligus sebagai pusat pengembangan ekonomi terpadu. Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) diubah menjadi daerah strategis sosial budaya, kawasan Jakabaring adalah kawasan daerah pertumbuhan ekonomi, perkantoran, sport city, perumahan, pusat perbelanjaan dan lainnya.

Selanjutnya kawasan Sungai Musi akan diubah menjadi daerah strategis sosial budaya dan lingkungan hidup, sedangkan kawasan yang berada di pusat kota adalah Central Business District (CBD). Kawasan Talang Kelapa difokuskan sebagai Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang merupakan daerah strategis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perumahan atau direncanakan sebagai kota baru. Terakhir adalah kawasan untuk industri dan pergudangan sehingga kendaraan yang bertonase besar tidak melewati jalan protokol yang sering membuat macet.

Dari rencana tersebut akan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan program yang pertama adalah penataan kawasan tepian sungai, pengelolaan kawasan strategis, pengembangan sistem pusat pelayanan, sarana dan prasarana kota, peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan fungsi kota sebagai pusat jasa, perdagangan, pariwisata berskala internasional dan pengembangan kawasan budaya.

Kedua adalah perencanaan pembangunan jalan tol Palembang-Betung, pembangunan jalan lingkar timur luar di kabupaten Banyuasin, dan jalan lingkar timur dalam yang nantinya terhubung dengan Jembatan Musi 3 di Pulau Kemaro.

Ketiga adalah pengembangan jaringan gas yang diarahkan untuk seluruh wilayah kota, dan sistem jaringan sumberdaya air, bidang pengendalian banjir yang akan menormalisasikan sungai Musi dan seluruh anak sungai serta kolam retensi. Selanjutnya akan dilakukan pembangunan jaringan drainase, retaining wall (dinding penguat) sepanjang sungai Musi dari Pulokerto sampai pulau Kemaro.

Keempat adalah pembangunan kolam retensi, yang rencananya akan dibangun 10 kolam lagi antara lain didaerah Sub DAS Gandus, Gasing, Lambidaro, Borang, Bendung,

Buah, Lawang Kidul, Selincah, Batang, dan Sriguna, juga akan dikembangkan jaringan jalur pedestrian koridor jalan utama, pedestrian jalur sepeda disepanjang tepian sungai Sekanak, Bendung dan Musi. Secara komprehensif perencanaan strategis kota Palembang dapat dilihat pada gambar berikut :

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Arsyad (2012) pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah.

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial ekonomi, system pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk yang lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas.

Menurut Direktorat pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah (2002) mempunyai prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah : (1) sebagai *growth center* yaitu pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional, (2) pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah, (3) pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan, (4) dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya (Dirjen Pengembangan wilayah dan Transmigrasi, 2003 dalam Fahrizal, 2011)

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya dikarenakan adanya kebutuhan manusia yang terus meningkat. Kondisi yang demikian ini membutuhkan suatu strategi pemanfaatan

sumberdaya alam yang efisien. Disamping itu perhatian dan konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya tanggung jawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat mengalokasikan sumberdaya secara adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraannya.

Secara tegas dimensi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempunyai tanggung jawab pada peningkatan ketersediaan dan kecukupan ekonomi, kelestarian asset yaitu efisiensi dalam pembangunan sumberdaya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Dalam hal ini pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan yang tinggi saja tanpa memperhatikan aspek social dan lingkungan. Pandangan ekologis didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan lingkungan akan terjadi di waktu yang akan datang dan dipengaruhi oleh segala aktivitas manusia.

Dengan demikian factor social dalam pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu factor yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan factor ekonomi dan ekologi, Bukti-bukti menjelaskan bahwa banyak proyek pembangunan yang kurang memperhatikan factor social kemasyarakatan akan menjadi ancaman bagi keberhasilan proyek atau program pembangunan yang dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memiliki hubungan dengan tujuan lingkungan. Keberhasilan dan keberlanjutan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh kondisi lingkungan hidup yang mendukung pembangunan ekonomi dan social. Pembangunan akan terhambat apabila kondisi sosial ekonomi masyarakat penuh dengan ketidak pastian

Oleh sebab itu untuk melihat bagaimana pelaksanaan perencanaan program di kota Palembang akan kita refleksi dengan meninjau 34 program prioritas tahun 2013-2018 yang telah direncanakan oleh pemerintah kota sebagai berikut :

1. Program penataan administrasi kependudukan
2. Program koordinasi, fasilitasi konsultasi dan supervisi pembangunan daerah
3. Program peningkatan kualitas dan produktifitas perizinan dan non perizinan

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah
5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
6. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
8. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
9. Program pengembangan industri kecil dan menengah
10. Program peningkatan kesempatan kerja
11. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
12. Program peningkatan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
13. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
14. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan
15. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
16. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
17. Program peningkatan kegiatan keagamaan
18. Program pengendalian pemanfaatan ruang
19. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
20. Program pengendalian banjir
21. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
22. Program pembangunan jalan dan jembatan
23. Program pengembangan perumahan
24. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
25. Program peningkatan pelayanan angkutan
26. Program pembangunan sapsras perhubungan
27. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
28. Program pendidikan anak usia dini
29. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun
30. Program pendidikan menengah
31. Program upaya kesehatan masyarakat
32. Program perbaikan gizi masyarakat
33. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
34. Program pengembangan pemasaran pariwisata (Sumber Bapeda kota Palembang)

Diantara sekian banyak program kerja dan skala prioritas, pemerintah kota Palembang juga berencana menghidupkan kembali tepian sungai Musi dengan nama programnya Water Front City (WFC) menuju zona ekonomi baru. Dari pengembangan rencana ini terdapat 7 (tujuh) titik kawasan tepian sungai Musi yang akan dijadikan pendukung rencana tersebut antara lain tepian sungai Sekanak, 5 Ulu, 14 Ulu, 11 Ulu, 7 Ulu., 3 Ulu, dan 4 Ulu.

Tahap awal pembangunan dimulai dengan pembangunan pulau Kemaro, turap dan pembebasan lahan secara bertahap. Luas lahan sekitar 25 hektar dengan dana 84 miliar, dan selama tiga tahun pengembangan pembebasan lahan ini akan dikebut. Lokasi dan revitalisasi pembebasan lahan tepian sungai Musi untuk ketujuh kawasan tersebut diatas dianggarkan oleh pemerintah kota Palembang pada tahun 2013 dan 2014 dengan alokasi dana dari APBD-P dan diperuntukan pembangunan hotel dan restoran.

Pendek kata tidak hanya kehidupan masyarakat yang diperbaiki namun juga perekonomian disepanjang tepian sungai Musi atau akan mengubah dari sistem tradisional menjadi daerah modern. Dengan adanya zona ekonomi baru tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Palembang dan mulai saat ini kawasan tersebut telah ditawarkan kepada investor dengan konsep terpadu yaitu pembangunan kawasan yang mempunyai fasilitas hotel, pendidikan cottage, pesantren, restoran dan lainnya.

Ketujuh titik kawasan tersebut akan dimulai pembebasan lahan secara bertahap, yang nantinya akan menyamai lokasi Benteng Kuto Besak (BKB). Selanjutnya BKB yang satu ini akan dimanfaatkan untuk area pameran kerajinan industri seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), agrowisata, wisata daerah, religi atau zona permainan terbuka yang representatif untuk usaha sehingga dapat membentuk zona ekonomi baru. Dimana selama ini kawasan tepian sungai Musi cenderung menjadi kawasan yang kumuh, semrawut penataannya.

Dari rencana tersebut kawasan ini akan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir, pajak dari kios-kios pedagang, dan lain-lain. Dalam tahun ini dapat realisasi dari pendapatan parkir dapat berkontribusi sebesar 3 triliun, diharapkan pada tahun depan akan naik menjadi 5 triliun (Pemkot Kota Palembang). Dengan naiknya PAD, maka pembangunan kota Palembang akan meningkat untuk semua sektor, sehingga dapat mengejar ketinggalan pembangunan yang pada akhirnya akan bermuara pada percepatan pembangunan secara komprehensif di kota Palembang.

Pembangunan tidak hanya untuk merevitalisasi pembebasan lahan tepian sungai Musi, namun juga diimbangi dengan penataan infrastruktur. Hal tersebut dimulai dari perbaikan pembenahan drainase sehingga banjir dapat diminimalisir khususnya daerah Sekip Bendung juga meluapnya anak sungai Musi jika hari hujan. Selain itu adanya perbaikan sistem kerja pintu air yang akan dialirkan ke kolam retensi dengan sistem buka tutup buat penampungan.

Dimensi wilayah sangat penting dan memang harus diperhitungkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Potensi dan kondisi masing-masing wilayah berbeda satu sama lainnya, sehingga potensi dan kondisi yang terdiri dari faktor-faktor internal dan eksternal dapat memberikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Perbedaan faktor internal dan eksternal tersebut harus dirumuskan secara tepat sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah untuk menentukan perencanaan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

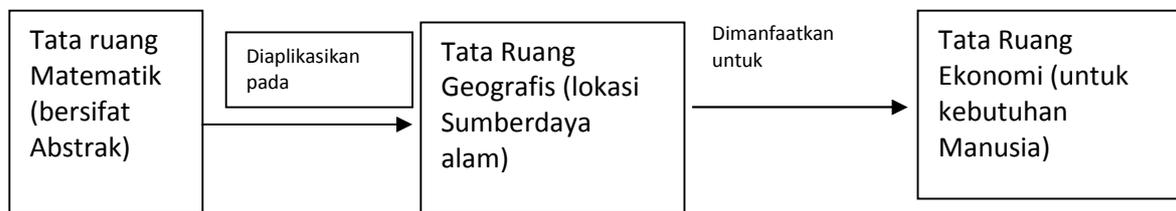
Dalam studi pembangunan wilayah peranan tata ruang wilayah sangat penting jika ditinjau dari perkembangan historis banyak mengalami perubahan dan pertumbuhan. Beberapa kasus *spasial* (tata ruang) dapat dikemukakan seperti terjadinya pemusatan kegiatan industri (*aglomerasi*) dan urbanisasi ke kota besar, terbentuknya pasar dan pusat kota baru menimbulkan perubahan dalam wilayah pengaruh atau wilayah pelayanan pemasaran antara kota dan wilayah pedesaan. Keterkaitan yang makin erat satu sama lainnya, saling melengkapi, dan kemungkinan akan membuat penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan.

Tata ruang wilayah dapat diartikan sebagai lingkungan tradisional dari kehidupan manusia mempunyai ketentuan-ketentuan dan kemampuannya sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatan penduduknya, dan bahkan tata ruang wilayah dianggap sebagai salah satu sasaran pembangunan. Secara logis dan historis tata ruang wilayah dapat dibagi menjadi tiga pengertian yaitu tata ruang wilayah ekonomi, tata ruang wilayah geografi, dan tata ruang wilayah matematik.

Konsep tata ruang wilayah ekonomi mempunyai pengertian bersifat operasional berkaitan dengan investasi, modal, jaringan transportasi, industri, dan teknologi pertanian . Kesemuanya dapat menciptakan perkembangan baru yang meliputi bahan-bahan material dan aturan-aturan baru sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan manusia, sehingga tata ruang wilayah ekonomi lebih bersifat kompleks dan bersifat multi dimensial. Tata ruang

wilayah geografi merupakan tata ruang wilayah tiga dimensi yang menempatkan manusia dalam lingkungan alam, sedangkan tata ruang wilayah matematik benar-benar bersifat abstrak yang tidak berkaitan dengan lokasi geografis.

Jika suatu tata ruang wilayah terbentuk semata-mata oleh variable-variabel ekonomi, maka tata ruang wilayah tersebut merupakan tata ruang matematik, yang mempunyai arti secara matematik dapat terjadi dimana-mana, akan tetapi sebaliknya tata ruang wilayah ekonomi merupakan aplikasi variable-variabel ekonomi di atas untuk kebutuhan manusia pada suatu tata ruang wilayah geografis dan melalui transformasi matematik dapat dijelaskan proses ekonomi. Selanjutnya ketiga jenis tata ruang wilayah di atas dapat diperlihatkan sebagai gambar berikut :



Gambar 1: Kaitan antar tata ruang wilayah matematika, tata ruang wilayah geografis, tata ruang wilayah ekonomi

Dilihat dari gambar di atas hubungan formal pembangunan, tata ruang wilayah ekonomi merupakan medan atau arena kekuatan (*a field of forces*). Tata ruang wilayah polarisasi, yaitu sebagai tempat dimana terdapat konsentrasi atau pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang relatif besar dan nyata berbeda dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pada bidang kegiatan industri dapat ditunjukkan gap atau kesenjangan yang makin besar dalam hal tingkat produktivitas di daerah perkotaan dan pedesaan sehingga akan menimbulkan ketimpangan *spatial*

Secara abstrak tata ruang wilayah ekonomi menekankan pada aspek pemusatan proses pertumbuhan pada titik-titik *spatial*. Dalam kerangka analisis wilayah dimensi geografis telah dimasukkan kedalam pengaruh pusat pengembangan, hal ini berarti bahwa tata ruang wilayah ekonomi berkaitan sangat erat dengan tata ruang wilayah geografis. Pembangunan berasal pada sejumlah kecil pusat-pusat perubahan yang terletak pada titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi, sehingga pembangunan cenderung menyebar ke bawah dan keluar. Penyebaran dari pusat-pusat tersebut menuju ke wilayah disekitarnya mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah tetapi penyebaran tidak membahas masalah pemilihan lokasi

optimum industri dan tidak pula menentukan jenis investasi apa yang sebaiknya di tetapkan di pusat-pusat urban tersebut.

Dimensi geografi dan lansekap ekonomi termasuk dalam variabel tambahan, yang penting untuk menyusun perencanaan pembangunan, dengan demikian pertanyaan mendasar dalam analisis ekonomi klasik dan liberal yang berkisar pada komoditas “apa” (*what to produce*), “bagaimana” (*how to produse*), “untuk siapa” (*for whom to produse*) masih harus ditambah pertanyaan “dimana” ? (*where to produce*), hal ini mempunyai makna bahwa dimensi tata ruang wilayah telah memberi warna penting dalam analisa ekonomi.

Gejala ekonomi menjadi lebih jelas secara eksplisit bahwa pertimbangan mengenai pentingnya dimensi tata ruang wilayah dalam perencanaan pembangunan dapat diungkapkan melalui lima persoalan utama ekonomi wilayah, antara lain sebagai berikut :

Petama yang berhubungan dengan penentuan landsekap ekonomi yaitu mengenai penyebaran kegiatan-kegiatan ekonomi pada tata ruang wilayah. Jika pemilihan lokasi tata ruang wilayahnya tidak tepat, maka kesalahan dapat diperbaiki dengan melakukan relokasi walaupun dibutuhkan waktu yang lama dan dana yang besar.

Kedua berkaitan dengan diintroduksikan konsep wilayah dalam analisis teoritik sebagai sub sistem *spasial* dari system ekonomi nasional. Dengan konsep wilayah tersebut telah mendorong penyusunan pembangunan *spasial* dan pembangunan regional serta pengukuran aktivitas ekonominya. Beberapa kriteria telah dikembangkan untuk menentukan batas suatu wilayah pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut. Kriteria tersebut bukan merupakan hal yang gampang, sehingga penentuan kriteria batas suatu wilayah digunakan batasan pembangunan administrasi pemerintahan.

Ketiga adalah analisis interaksi antara wilayah yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk interaksi antar wilayah yaitu arus pergerakan faktor produksi dan pertukaran komoditas. Penjelasan mengenai terjadinya arus pergerakan faktor produksi dan pertukaran komoditas dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi suatu wilayah merupakan titik sentral dalam permasalahan ekonomi wilayah

Keempat adalah persoalan analisis optimum yang selalu dikaitkan dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai seperti alokasi sumberdaya yang optimal (*Pareto optimum allocation of resources*) atau minimasi masukan yang tertentu. Spesialisasi produksi

dilakukan pada wilayah secara optimal dan pertukaran komoditas juga dilakukan dengan analisis optimum sebagai pembahasan dan implikasi tujuan yang telah ditentukan.

Kelima berkaitan dengan persoalan kebijakan merupakan kegiatan yang berusaha untuk memperhatikan dan memperhitungkan pengaruh perilaku ekonomi pada suatu lingkungan *spasial*. Kebijakan ekonomi berusaha mengendalikan dan mengontrol struktur dan proses ekonomi dalam subsistem ekonomi nasional

Dampak *aglomerasi* dan *polarisasi* wilayah dapat memberikan dorongan bagi wilayah yang relatif sudah makmur untuk berkembang lebih maju, daerah yang belum berkembang relatif menuju agak makmur, dan juga dapat menciptakan keserasian antar wilayah yang memerlukan kebijakan ekonomi wilayah yang tepat dan sesuai.

Pemerintah kota Palembang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan program pembangunan dari Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Program ini merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diperuntukan untuk pembangunan sarana infrastruktur.

Dalam pelaksanaan program tersebut khususnya untuk pembangunan percepatan pertumbuhan ekonomi banyak mengalami hambatan, terutama jika berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sarana jalan yang mulus belum terwujud, jembatan yang memerlukan pembebasan lahan. Permasalahan timbul dikarenakan besaran ganti rugi lahan yang tidak disepakati antara pemerintah dan pemilik lahan. Pada umumnya pemilik lahan adalah para pejabat yang dari awal telah melihat perencanaan tata kota, atau rencana pemekaran daerah, sehingga mereka berlomba untuk menguasai lahan-lahan yang strategis, dan dalam kurun waktu tertentu harga lahan bisa naik sampai 200 kali lipat.

Selain itu masalah yang tidak kalah pentingnya dan kemungkinan sama permasalahan yang dialami oleh kota lain di Indonesia adalah urbanisasi, sampah, kemacetan, dan masalah sosial. Permasalahan yang seharusnya diatasi dalam kurun waktu 20 tahun akan dicoba dapat diatasi dalam kurun waktu 5 tahun, oleh sebab itu masalah pertama yang harus diatasi adalah kemacetan. Masalah ini harus dipikirkan serius karena ketersediaan ruas jalan dengan pertumbuhan kendaraan tidak seimbang, dan harus ada ring road antara jalan propinsi dan kota yang jelas sesuai dengan porsinya agar tidak tumpang tindih. Permasalahan lain adalah sampah yang belum optimal karena belum mengandung nilai ekonomi, padahal dengan

pengelolaan sampah yang benar (memisahkan antara organik, anorganik, kering, basah) semua bisa mempunyai nilai ekonomi dengan mengelola dengan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Selanjutnya masalah urbanisasi yang terjadi setiap tahun yang berdampak pada masalah tempat tinggal dan gaji semakin meningkat. Kondisi ini sangat berkorelasi erat dengan permasalahan sosial, antara lain pemberian layanan air bersih, keamanan, dan kesejahteraan.

Hambatan selanjutnya adalah dari segi pendanaan antara pemerintah dengan perbankan, yaitu pihak bank tidak mudah memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Besarnya pinjaman oleh pihak perbankan dianalisa terlebih dahulu, jika tidak terjadi kesepakatan maka akan dikembalikan kepada investor. Selanjutnya hambatan teknis konstruksi dikarenakan kondisi lahan yang labil, daerah rawa-rawa, ancaman gempa hingga ke struktur geografis, lahan yang strategis dimiliki tuan-tuan tanah, sehingga hal ini memerlukan dana yang besar.

Lambannya pembangunan di kota Palembang harus dijadikan perhatian, ditambah lagi dengan adanya tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kebiasaan warga Palembang khususnya dari penduduk asli Sumatera Selatan dengan membawa pisau di pinggang merupakan kebanggaan. Banyak yang mengandaikan pisau cap garpu di pinggang sebagai lambang kelam kriminalitas jalanan. Stigma yang melekat di benda ini sangat jelek sebagai kriminalitas, walaupun pisau cap garpu bagus dan disenangi oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai alat memasak di dapur. Namun, dampak akhirnya akan sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi, masyarakat untuk beraktivitas dalam menunjang kegiatan ekonomi di kota Palembang.

Selain itu terdapat beberapa isu analisis mengenai evaluasi hambatan dalam perencanaan kota Palembang yang tertuang dalam laporan Bapeda pemerintah kota Palembang antara lain, adalah rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kualitas lingkungan, fungsi sistem drainase perkotaan yang belum optimal, dan masih tingginya angka pengangguran. Selain itu adanya sistem manajemen transportasi yang belum optimal, penurunan kawasan hijau perkotaan, belum optimalnya promosi kebudayaan kepariwisataan, dan masih perlunya peningkatan akses air bersih.

D. Kesimpulan

Pentingnya dimensi wilayah sebagai faktor lokasional dalam perencanaan pembangunan telah terbukti dilakukan oleh pemerintah kota Palembang melalui Rencana

Sembilan Kawasan Strategis yang telah dituangkan dalam beberapa program prioritas kota 2013-2018.

E. Saran

1. Pemerintah kota Palembang hendaknya menjaga sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, lingkungan hidup
2. Dalam melaksanakan rencana prioritas dapat menjaga iklim usaha yang ada
3. Memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan usaha menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan,
4. Meningkatkan prospek investasi perbankan.
5. Masyarakat dapat memberikan dukungan dan peran dalam pembangunan ekonomi dan sosial

F. Daftar Pustaka

- Adisasmita R. 2008. Pengembangan Wilayah. Konsep dan Teori. Graha Ilmu. Jakarta
- Arsyad,L. 1992. Ekonomi Pembangunan.STIE YKPN. Jogjakarta
- ,1993. Pengantar Perencanaan Ekonomi. Media Widya Mandala. Jogjakarta
- ,1999. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPEE. UGM. Jogjakarta
- Bachri Fachrizal. 2011. Studi Pengembangan Model Ekonomi Makro dan Kebijakan Ekonomi Regional Kota Pagar Alam. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Halaman 21-34. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Bapeda Palembang,2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2008-2013 (Perda Kota Palembang Nomor 6 tahun 2009). Pemerintah Kota Palembang)
- Didik Susetya. 2011. Ekonomi Regional.Universitas Sriwijaya. Palembang
<http://palembang.kota.bps.go.id/pdf>
<http://bapeda.kota.palembang.go.id/pdf>
- Masahisa Fujita, K.Paul, Anthony J. 1999. The Spatial Economy. Cities, Regional, and Internal Trade.London. The Mit Press Cambridge
- Priyarsono, D,S, Sahara, Firdaus,M. 2007. Ekonomi Regional. Universitas Terbuka Jakarta.
- Tambunan Tulus. 2012. Perekonomian Indonesia. Beberapa Masalah Penting. Ghalia. Jakarta
- Sumatera Ekspres. 16 Mei 2014
- Sumatera Ekspres, 6 Agustus 2014
- Sumatera Ekspres, 7 Agustus 2014
- Sumatera Ekspres, 11 Agustus 2014